

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG
JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS**

NOTA DINAS

NOMOR : AK/14/D.I.M.EKON.6/01/2026

Yth. : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara
Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Hal : Penyampaian Narasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 22 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Dalam rangka implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Narasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Pengembangan
Badan Usaha Milik Negara Bidang
Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis,



Gunawan Pribadi
NIP 196808141989031001

Tembusan Yth.:
Sekretaris Deputi I

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis				
1.1	Indikator 1.1 Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	RpTriliun	Rp 9,55 T (s.d. TW4: Rp9,55 T)	Rp16,0 T*	120%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi	Persentase	54% (s.d. TW4: 54%)	60,71%	112%
1.3	Indikator 1.3 Persentase Debitur KUR Baru	Persentase	40% (s.d. TW4: 40%)	53,47%	120%
1.4	Indikator 1.4 Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas	Persentase	20% (s.d. TW4: 20%)	28,7%	120%
1.5	Indikator 1.5 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	RpTriliun	Rp255 T (s.d. TW4: Rp255T)	Rp270,08 T	106%
1.6	Indikator 1.6 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Persentase	80% (s.d. TW4: 80%)	80%	100%
II	Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas				
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait	Persentase	80% (s.d. TW4: 80%)	80%	100%

2.1	penyaluran KUR, KUA, dan KIPK Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion	Persentase	80% (s.d. TW4: 80%)	80%	100%
III	Sasaran Kegiatan 3: <i>Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas</i>				
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Indeks	3 dari 4 (Semester II)	3,79	120%
IV	Sasaran Kegiatan 4: <i>Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas</i>				
4.1	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Persentase	85% (s.d. TW 4: 85%)	85%	100%

*Penghitungan berdasarkan proyeksi BP BUMN

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis ditunjukkan oleh pencapaian enam indikator kinerja, yaitu:

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1 Realisasi
Jumlah Belanja
Modal BUMN
Bidang Jasa
Keuangan dan
Usaha Bisnis**

Latar Belakang

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBP maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan peran strategisnya, BUMN juga didorong untuk merealisasikan investasi melalui belanja modal yang produktif, khususnya pada sektor industri jasa keuangan dan usaha bisnis. Belanja modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional, mendorong substitusi impor, dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dalam negeri.

Pengembangan Usaha BUMN merupakan upaya pengelolaan BUMN melalui pengembangan dan diversifikasi usaha, restrukturisasi dan revitalisasi, peningkatan sinergi antar BUMN, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN sehingga dapat memberikan kontribusi penerimaan negara.

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertumbuhan *output* dalam periode tertentu yang meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan indikator seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam hal ini, belanja modal BUMN di sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis berperan sebagai pendorong investasi yang mendukung peningkatan kapasitas produksi, daya saing industri, dan transformasi ekonomi nasional.

BUMN bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria diantaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), atau BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, serta di bawah koordinasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis (BUMN Himbara) dengan target: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp6,8 Triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp4,5 Triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1,8 Triliun, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk sebesar Rp2,9 Triliun, sehingga total capaian Capex 2025 sebesar Rp16,0 Triliun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang

Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar Rp16 T dengan target Triwulan IV 2025 Rp9,55 T, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.1. Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.	Rp T	Rp9,55 T	Rp16 T	120%

Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dengan target tahun 2025 sebesar Rp9,55 Triliun. Sampai dengan Triwulan IV 2025 telah terealisasi sebesar Rp16 Triliun atau mencapai 120% dari target Triwulan IV 2025 sebesar Rp9,55 T.

Realisasi ini berdasarkan surat nomor S-52/DKU.MBU/11/2025 dari kementerian BUMN Tanggal 13 November 2025 Hal Penyampaian Data Realisasi Capex BUMN s.d. Triwulan III dan Proyeksi Triwulan IV Tahun 2025.

Realisasi Triwulan IV 2025 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan IV 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Evaluasi realisasi belanja modal BUMN HIMBARA tahun 2025	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterima surat dari BP BUMN pada tanggal 13 November 2025 hal Penyampaian Data Realisasi Capex BUMN s.d. Triwulan III dan Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 2. Telah dikirimkan Surat dari Asdep PBUMN Bidang JKUB Nomor B/AK.01/2/D.I.M.EKON.6/01/2026 Tanggal 13 Januari 2026 Hal Permohonan Data Realisasi Belanja Modal (Capital Expenditure) Tahun 2025
2	Monitoring tingkat utilitas belanja modal BUMN HIMBARA tahun	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterima surat dari BP BUMN pada tanggal 13 November 2025 hal Penyampaian Data

	2025		<p>Realisasi Capex BUMN s.d. Triwulan III dan Proyeksi Triwulan IV tahun 2025</p> <p>2. Telah dikirimkan Surat dari Asdep PBUMN Bidang JKUB Nomor B/AK.01/2/D.I.M.EKON.6/01/2026 Tanggal 13 Januari 2026 Hal Permohonan Data Realisasi Belanja Modal (Capital Expenditure) Tahun 2025</p>
3	Proyeksi belanja modal BUMN HIMBARA tahun 2026	Terlaksana a	<p>1. Telah diterima surat dari BP BUMN pada tanggal 13 November 2025 hal Penyampaian Data Realisasi Capex BUMN s.d. Triwulan III dan Proyeksi Triwulan IV tahun 2025</p> <p>2. Telah dikirimkan Surat dari Asdep PBUMN Bidang JKUB Nomor B/AK.01/2/D.I.M.EKON.6/01/2026 Tanggal 13 Januari 2026 Hal Permohonan Data Realisasi Belanja Modal (Capital Expenditure) Tahun 2025</p>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi secara efektif kepada BUMN terkait
2. Mengumpulkan data Capex Bank BUMN Himbara

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara jadwal pelaporan kinerja BUMN dengan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan laporan kinerja ini, sehingga data dan informasi dari BUMN belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam tahap konsolidasi;
2. Koordinasi antar kementerian dan lembaga masih kompleks

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperbarui data secara berkala guna mendukung pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja BUMN;
2. Meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi

1.2 Persentase
Capaian
Penyaluran KUR
di Sektor
Produksi

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Penyaluran KUR di sektor produksi adalah porsi penyaluran KUR di sektor produksi dibandingkan dengan total penyaluran KUR selama 1 (satu) tahun.

Adapun target penyaluran KUR pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp255 triliun, dengan alokasi penyaluran ke sektor produksi sebesar 54%. Agar proporsi penyaluran KUR di sektor produksi tetap terjaga perlu adanya penetapan target penyaluran pada setiap triwulan sebesar 54%. Yang dimaksud dengan sektor produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa di luar sektor perdagangan. Dengan demikian, capaian penyaluran KUR di sektor produksi mencerminkan akumulasi penyaluran KUR pada seluruh sektor kegiatan ekonomi selain sektor perdagangan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi sebesar 60,71% dengan target Triwulan IV 2025 sebesar 54%, sehingga tercapai 112%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.2 Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi	Persentase	54%	60,71%	112%

Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi dengan target tahun 2025 sebesar 54%. Sampai dengan Triwulan IV 2025 telah terealisasi sebesar 60,71% atau mencapai 112% dari target Triwulan IV 2025 sebesar 54%.

Realisasi Triwulan IV 2025 didorong oleh koordinasi yang efektif antar *stakeholder* tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan IV 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi

Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2025	Terlaksana	3. Telah dilaksanakan Akad Massal KUR, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peluncuran Kredit Program Perumahan pada tanggal 20 Oktober di Surabaya. 4. Menjadi Narasumber KUMKM: Sosialisasi Pembiayaan KUR Khusus/Klaster pada tanggal 16 Oktober 2025 di Kabupaten Bandung
2	Melaksanakan Diskusi Terfokus langkah-langkah akhir tahun untuk mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan FGD Sinergi Tahun 2025 dan Arah Kebijakan Tahun 2026 Kredit Program Pemerintah (KUR, Kredit Alsintan, KIPK, KPP) pada tanggal 13 November 2025 di Yogyakarta
3	Melaksanakan Diskusi Terfokus terkait evaluasi penyaluran dan penjaminan KUR tahun 2025	Terlaksana	Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyaluran Kredit Program Tahun 2025 pada tanggal 10 – 11 November 2025
4	Melaksanakan penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster sesuai dengan arahan Menko	Terlaksana	Menjadi Narasumber KADIN di FGD Optimalisasi Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Tebu Indonesia pada tanggal 18 November 2025
5	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Eselon I pada tanggal 14 November 2025

6	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR tahun 2026	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Menteri pada tanggal 17 November 2025 tentang evaluasi tahun 2025 dan arah kebijakan 2026 2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Menteri tentang paket kebijakan KUR terdampak bencana sumatera pada tanggal 16 Desember 2025
---	--	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2025
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

1.3 Persentase Debitur Baru KUR

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR.

Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Debitur KUR Baru adalah debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR. Persentase debitur baru adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Debitur KUR Baru sebesar 53,47 % dengan target Triwulan IV 2025 sebesar 40%, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.3 Persentase Debitur KUR Baru	Persentase	40%	53,47%	120 %

Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 31 Desember 2025, didapatkan hal sebagai berikut:

Total debitur KUR s.d. 30 Desember 2025 sebanyak 4,59 juta debitur. Persentase Debitur KUR Baru dengan target tahun 2025 sebesar 40%. Sampai dengan Triwulan IV 2025 telah terealisasi sebesar 53,47% atau mencapai 120 % dari target Triwulan IV 2025 sebesar 40%.

Realisasi Triwulan IV 2025 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan IV 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2025	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan Akad Massal KUR, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peluncuran Kredit Program Perumahan pada tanggal 20 Oktober di Surabaya. Menjadi Narasumber KUMKM: Sosialisasi Pembiayaan KUR

			Khusus/Klaster pada tanggal 16 Oktober 2025 di Kabupaten Bandung
2	Melaksanakan Diskusi Terfokus langkah-langkah akhir tahun untuk mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan FGD Sinergi Tahun 2025 dan Arah Kebijakan Tahun 2026 Kredit Program Pemerintah (KUR, Kredit Alsintan, KIPK, KPP) pada tanggal 13 November 2025 di Yogyakarta
3	Melaksanakan Diskusi Terfokus terkait evaluasi penyaluran dan penjaminan KUR tahun 2025	Terlaksana	Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyaluran Kredit Program Tahun 2025 pada tanggal 10 – 11 November 2025
4	Melaksanakan penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster sesuai dengan arahan Menko	Terlaksana	Menjadi Narasumber KADIN di FGD Optimalisasi Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Tebu Indonesia
5	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Eselon I
6	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR tahun 2026	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Menteri pada tanggal 17 November 2025 tentang evaluasi tahun 2025 dan arah kebijakan 2026 2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Menteri tentang paket kebijakan KUR terdampak bencana sumatera

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran

KUR Tahun 2025

2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

1.4 Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR.

Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Debitur KUR Baru adalah debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR. Persentase debitur baru adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas sebesar 28,7% dengan target Triwulan IV 2025 sebesar 20%, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.4 Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas	Persentase	20%	28,7%	120%

Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 30 Desember 2025, didapatkan hal sebagai berikut:

Total debitur KUR s.d. 30 Desember 2025 sebanyak 4,59 juta debitur. Persentase Debitur KUR Graduasi/naik kelas dengan target tahun 2025 sebesar 20%. Sampai

dengan Triwulan IV 2025 telah terealisasi sebesar 28,7% atau mencapai 120% dari target Triwulan IV 2025 sebesar 20%.

Realisasi Triwulan IV 2025 didorong oleh koordinasi yang efektif antar *stakeholder* tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan IV 2025

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2025	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Akad Massal KUR, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peluncuran Kredit Program Perumahan pada tanggal 20 Oktober di Surabaya. 2. Menjadi Narasumber KUMKM: Sosialisasi Pembiayaan KUR Khusus/Klaster pada tanggal 16 Oktober 2025 di Kabupaten Bandung
2	Melaksanakan Diskusi Terfokus langkah-langkah akhir tahun untuk mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan FGD Sinergi Tahun 2025 dan Arah Kebijakan Tahun 2026 Kredit Program Pemerintah (KUR, Kredit Alsintan, KIPK, KPP) pada tanggal 13 November 2025 di Yogyakarta
3	Melaksanakan Diskusi Terfokus terkait evaluasi penyaluran dan penjaminan KUR tahun 2025	Terlaksana	Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyaluran Kredit Program Tahun 2025 pada tanggal 10 – 11 November 2025
4	Melaksanakan penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster sesuai dengan arahan Menko	Terlaksana	Menjadi Narasumber KADIN di FGD Optimalisasi Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Tebu Indonesia

5	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Eselon I
6	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR tahun 2026	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Menteri pada tanggal 17 November 2025 tentang evaluasi tahun 2025 dan arah kebijakan 2026. 2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Menteri tentang paket kebijakan KUR terdampak bencana Sumatera.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2025
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar *stakeholder* KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR.

Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Debitur KUR Baru adalah debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR. Persentase debitur baru adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Jumlah realisasi Penyaluran KUR sebesar Rp270,08 Triliun dengan target Triwulan IV 2025 sebesar Rp255 Triliun, sehingga tercapai 106%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.5 Jumlah Realisasi Penyaluran KUR	Rp T	Rp255 T	Rp270,08 T	106%

Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 31 Desember 2025, didapatkan hal sebagai berikut:

Realisasi KUR Jan 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp270,08 triliun dan diberikan kepada 4,59 juta debitur.

Realisasi Triwulan IV 2025 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan IV 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2025	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Akad Massal KUR, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peluncuran Kredit Program Perumahan pada tanggal 20 Oktober di Surabaya.

			2. Menjadi Narasumber KUMKM: Sosialisasi Pembiayaan KUR Khusus/Klaster pada tanggal 16 Oktober 2025 di Kabupaten Bandung
2	Melaksanakan Diskusi Terfokus langkah-langkah akhir tahun untuk mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan FGD Sinergi Tahun 2025 dan Arah Kebijakan Tahun 2026 Kredit Program Pemerintah (KUR, Kredit Alsintan, KIPK, KPP) pada tanggal 13 November 2025 di Yogyakarta
3	Melaksanakan Diskusi Terfokus terkait evaluasi penyaluran dan penjaminan KUR tahun 2025	Terlaksana	Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyaluran Kredit Program Tahun 2025 pada tanggal 10 – 11 November 2025
4	Melaksanakan penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster sesuai dengan arahan Menko	Terlaksana	Menjadi Narasumber KADIN di FGD Optimalisasi Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Tebu Indonesia
5	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Eselon I
6	Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR tahun 2026	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Menteri pada tanggal 17 November 2025 tentang evaluasi tahun 2025 dan arah kebijakan 2026. 2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Menteri tentang paket kebijakan KUR terdampak bencana sumatera.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2025
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2025

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

1.6

Latar Belakang

Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis. Penugasan pemerintah kepada BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang dikoordinasikan diantaranya mencakup:

1. Pelaksanaan penugasan kepada Bank Himbara dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya;
2. Pelaksanaan penugasan pengembangan ekosistem kegiatan Usaha Bulion kepada PT Pegadaian (Persero) dan Bank BSI.

IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis untuk memperkuat akses permodalan dan mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar 80% dengan target Triwulan IV 2025 sebesar 80%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.6 Persentase Penyelesaian Penugasan	Persentase	80%	80%	100%

Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dengan target tahun 2025 sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan IV 2025 telah terealisasi sebesar 80% atau mencapai 100% dari target Triwulan IV 2025 sebesar 80%. Pencapaian ini didasarkan atas realisasi rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV 2025.

Realisasi Triwulan IV 2025 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan IV 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Koordinasi dan monitoring dengan BUMN Bidang Jasa Keuangan terkait dengan penyelesaian penugasan pemerintah	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi dan monitoring terkait dengan penyaluran KUA dan KIPK dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion
2	Monitoring dan evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya oleh Bank HIMBARA	Terlaksana	1. Menjadi Narasumber Kementan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Kredit Alsintan pada tanggal 16 Oktober 2025 di Bandung. 2. Menjadi Narasumber Kemenperin: Sosialisasi Program KIPK pada tanggal 31 Oktober 2025 di Surakarta.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur KUA dan KIPK terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUA dan KIPK Tahun 2025
2. Koordinasi yang efektif dan terfokus kepada Penyelenggara Kegiatan Usaha

Bulion Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR
3. Kurangnya koordinasi yang efektif terkait dengan persiapan launching kegiatan usaha bulion
4. Kurangnya komunikasi aktif terkait dengan progres monitoring kegiatan usaha bulion kepada PT Pegadaian dan Bank BSI

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif
3. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait untuk pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion
4. Komunikasi yang aktif dengan BUMN penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion

2

Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase

***Efektivitas
Sinkronisasi,
Koordinasi, dan
Pengendalian
kebijakan terkait
penyaluran KUR,***

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK).

KUA, dan KIPK

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, dan KIPK sebesar 80% dengan target Triwulan IV 2025 sebesar 80%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, dan KIPK	Persentase	80%	80%	100%

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, dan KIPK dengan target tahun 2025 sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan IV 2025 telah terealisasi sebesar 80% atau mencapai 100% dari target Triwulan IV 2025 sebesar 80%. Pencapaian ini didasarkan atas realisasi rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV 2025.

Realisasi Triwulan IV 2025 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada Triwulan IV 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komite

	Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan penyaluran KUR, KUA, dan KIPK		<p>Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Tingkat Menteri pada tanggal 17 November 2025 tentang evaluasi tahun 2025 dan arah kebijakan 2026</p> <p>2. Rapat Pleno Harmonisasi atas RPermenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR sesuai amanat Komjak tingkat Menteri pada tanggal 30 Desember 2025</p>
--	---	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2025
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion sebesar 80% dengan target triwulan IV 2025 sebesar 80%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion	Persentase	80%	80%	100%

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion dengan target tahun 2025 sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan IV 2025 telah terealisasi sebesar 80% atau mencapai 100% dari target Triwulan IV 2025 sebesar 80%. Pencapaian ini didasarkan atas realisasi rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV 2025.

Realisasi Triwulan IV 2025 didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada triwulan IV 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion	Terlaksana	Terselenggaranya acara Bullion Connect: Strengthening the Future Resilience of Indonesia's Bullion Market through Strong Collaboration" (Featuring with the Launch of the WGC Gold Consumer Survey Report) pada tanggal 12 November 2025 di Jakarta

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dengan K/L terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2025
2. Komunikasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur dan Penjamin KUR terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Tahun 2025

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis
2. Memperkuat komunikasi yang efektif

3

Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan

Usaha Bisnis yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Latar Belakang

Sasaran strategis Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas berfokus pada tugas dan fungsi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang mencakup:

- sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis;
- pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar 3,79, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan	Indeks	3 dari 4	3,79	120%

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden. Dengan total responden sebesar 25 responden

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Semester II 2025	Terlaksana	Telah dilakukan Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Semester II 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang efektif kepada stakeholder dalam rangka persiapan survei kepuasan layanan
2. Pengumpulan konsep pertanyaan survei kepada stakeholder

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah proses meyakinkan responden untuk mengisi survei pada Triwulan IV 2025.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya yaitu mengingatkan responden untuk pengisian survei pada Semester II 2025.

4

Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang baik merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program keasdepan dengan baik. Dalam pelaksanaannya program Keasdepan ditunjang dengan kegiatan administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Tata Kelola asisten deputi yang baik merupakan *cascading* dari "Terwujudnya Tata Kelola yang Baik". Dengan terwujudnya tata kelola di seluruh Asisten Deputi dalam satu Deputi diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan kegiatan yang optimal yang kemudian dapat mendorong kinerja Deputi pada umumnya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar 85% dengan target triwulan IV 2025 sebesar 85%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Persentase	85%	85%	100%

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulanan

2	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilakukan Penyusunan Renja 2026
3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi
2. Optimalisasi digitalisasi arsip di Keasdepan PBUMN Bidang JKUB
3. Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggunaan Akun Srikandi pada Seluruh Pegawai Kemenko Perekonomian Tanggal 18 Juni 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum adanya keseragaman format dalam penyusunan Manual IKU, Renaksi, dan Laporan Kinerja Triwulanan
2. Sistem Srikandi sering mengalami kendala teknis
3. Belum semua pegawai memahami pemanfaatan SRIKANDI

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

1. Koordinasi yang efektif dengan Sekretaris Deputi dan Biro Perencanaan terkait dengan penyusunan Manual IKU, Renaksi, dan Laporan Kinerja Triwulanan
2. Dilakukan sosialisasi internal terkait dengan penggunaan SRIKANDI serta koordinasi aktif dengan tim helpdesk SRIKANDI untuk troubleshooting dan optimalisasi sistem

